

## Rekonstruksi Imperialisme Prancis di Aljazair pada Abad 19

Ai Putri Arumsari<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,  
Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat  
email : [aiputriarum@gmail.com](mailto:aiputriarum@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses imperialisme Prancis di Aljazair sejak invasi tahun 1830 hingga dampaknya terhadap kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masyarakat lokal. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kontradiksi antara klaim Prancis yang ingin membebaskan Aljazair dari kekuasaan Turki Utsmani dengan realitas praktik kolonial yang sarat kepentingan ekspansi kekuasaan dan ekonomi di Afrika Utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik (pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan), kritik (pengujian keabsahan sumber), interpretasi (penafsiran data), dan historiografi (penulisan sejarah secara sistematis). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber primer dan sekunder. Analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan hubungan sebab-akibat dari kebijakan kolonial yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menguasai Aljazair, Prancis menerapkan kebijakan represif seperti perubahan sistem pemerintahan, marginalisasi pendidikan berbasis Islam, penghapusan bahasa dan budaya Arab, serta eksploitasi ekonomi melalui perampasan tanah. Dampak yang ditimbulkan meliputi ketimpangan sosial-ekonomi, diskriminasi terhadap penduduk pribumi, serta krisis kemanusiaan berupa kematian massal akibat kekerasan, kelaparan, dan wabah penyakit. Pembahasan menegaskan bahwa imperialisme Prancis tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga struktural dan kultural yang bertujuan menghapus identitas bangsa Aljazair. Kesimpulannya, imperialisme Prancis di Aljazair merupakan bentuk penjajahan komprehensif yang berdampak luas dan berkepanjangan terhadap kehidupan masyarakat lokal.

**Kata kunci:** Aljazair, Prancis, Imperialisme

### ABSTRACT

*This article discusses the process of French imperialism in Algeria from the invasion of 1830 to its impact on the political, economic, educational, and religious life of the local community. The background of this study is based on the contradiction between France's claim to liberate Algeria from Ottoman rule and the reality of colonial practices that were fraught with interests in power and economic expansion in North Africa. The method used is a historical research method that includes four stages: heuristics (collecting relevant historical sources), criticism (testing the validity of sources), interpretation (interpreting data), and historiography (writing history systematically). Data collection techniques are carried out through literature studies of various primary and secondary sources. Descriptive analysis is carried out by describing the cause-and-effect relationships of the implemented colonial policies. The results of the study show that after controlling Algeria, France implemented repressive policies such as changes to the government system, marginalization of Islamic-based education, the elimination of Arabic language and culture, and economic exploitation through land confiscation. The resulting impacts included socio-economic inequality, discrimination against the indigenous population, and a humanitarian crisis resulting from mass deaths due to violence,*

*famine, and disease outbreaks. The discussion emphasizes that French imperialism was not only physical but also structural and cultural, aimed at eradicating Algerian national identity. In conclusion, French imperialism in Algeria was a comprehensive form of colonialism that had a broad and lasting impact on the lives of local communities.*

**Keywords:** *Algeria, France, Imperialism*

## **A. PENDAHULUAN**

Penjajahan Prancis di Aljazair merupakan salah satu babak paling kelam dalam sejarah kolonialisme modern. Dengan alasan semu untuk “membebaskan” Aljazair dari kekuasaan Turki Utsmani, Prancis justru memulai proyek imperialisme yang berlandaskan ambisi politik, ekonomi, dan dominasi budaya. Sejak awal kedatangannya pada tahun 1830, kolonialisme Prancis tidak hanya menaklukkan wilayah secara militer, tetapi juga berupaya menundukkan masyarakat Aljazair melalui kekerasan sistematis, kebijakan diskriminatif, serta upaya penghapusan identitas keislaman dan kebangsaan mereka.

Kekuasaan kolonial ini membawa perubahan besar terhadap tatanan sosial dan politik di Aljazair. Struktur pemerintahan tradisional yang sebelumnya berakar pada nilai-nilai Islam dan kepemimpinan lokal digantikan oleh sistem kolonial yang menyingkirkan tokoh-tokoh sufi dan ulama yang berpengaruh. Dalam bidang pendidikan, Prancis menghapus sistem madrasah dan lembaga keagamaan, menggantinya dengan pendidikan bergaya Barat yang hanya dapat diakses oleh kalangan elit atau pendatang Eropa. Kebijakan semacam ini secara perlahan menciptakan kesenjangan sosial yang tajam antara penduduk asli dan imigran, sekaligus mempercepat proses marginalisasi masyarakat pribumi.

Selain penindasan budaya dan pendidikan, kolonialisme Prancis juga membawa dampak ekonomi yang menghancurkan. Tanah-tanah subur milik rakyat Aljazair dirampas dan diberikan kepada para imigran Eropa, sedangkan penduduk lokal dipaksa hidup di wilayah tandus yang sulit ditanami. Akibatnya, kemiskinan, kelaparan, dan wabah penyakit meluas di seluruh negeri. Sementara itu, kekerasan dan pembantaian terhadap penduduk sipil dijadikan alat politik untuk menanamkan ketakutan dan menegakkan kekuasaan mutlak.

Pendudukan Prancis di Aljazair tidak hanya meninggalkan luka sejarah yang dalam, tetapi juga menjadi simbol bagaimana kekuasaan kolonial beroperasi atas dasar kekerasan dan ketidakadilan. Melalui analisis terhadap kebijakan, praktik, dan dampak imperialisme Prancis, artikel ini berupaya mengungkap bagaimana penjajahan tersebut tidak hanya menghancurkan struktur sosial dan ekonomi Aljazair, tetapi juga berusaha menghapus identitas bangsa dan agama yang telah mengakar selama berabad-abad.

Dalam konteks pengkajian sejarah seperti ini, seorang sejarawan umumnya tidak memulai dari keadaan yang benar-benar tanpa pengetahuan. Ia biasanya telah memiliki pemahaman awal mengenai topik yang diteliti, yang diperoleh dari berbagai bacaan atau referensi yang sebelumnya telah dipelajari atau dikenalnya<sup>1</sup>. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai rujukan atau literatur seperti buku, skripsi, dan jurnal yang selanjutnya dijadikan tolak ukur pada penelitian yaitu:

Pertama, skripsi berjudul “*Dampak Kebijakan Prancis Terhadap Masyarakat Aljazair 1830-1914*” oleh Silpia Ulhaq. Secara umum skripsi ini menjelaskan kondisi Aljazair yang mudah dikuasai karena tidak memiliki pemerintahan yang kuat dan terdiri dari berbagai suku sehingga memudahkan Prancis untuk menguasai Aljazair. Fokus utama skripsi ini adalah mengkaji kebijakan-kebijakan Prancis serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dalam berbagai bidang. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas dampak kebijakan Prancis terhadap masyarakat Aljazair, tetapi juga menelusuri secara lebih mendalam proses terjadinya imperialisme Prancis sejak awal invasi hingga terbentuknya sistem kolonial yang menekan masyarakat lokal. Penelitian ini mengkaji dinamika awal masuknya kekuasaan Prancis, strategi penguasaan wilayah, serta faktor-faktor yang mempermudah kolonialisasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan sebab-akibat antara proses imperialisme dan dampak yang ditimbulkannya. Hal ini berbeda dengan skripsi karya Silpia Ulhaq yang lebih berfokus pada analisis kebijakan Prancis dan dampaknya saja, tanpa menguraikan secara rinci proses historis terjadinya imperialisme tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami kolonialisme Prancis di Aljazair.

Kedua, artikel berjudul “*Sejarah Perkembangan Islam di Aljazair*” oleh Syaiful Anam. Secara umum artikel ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Aljazair. Perkembangan Islam di wilayah ini tidak terlepas dari dinamika sejarah yang diwarnai oleh berbagai kekuasaan asing akibat kondisi masyarakat yang terfragmentasi dalam banyak suku. Sebelum kedatangan Prancis, pendidikan Islam berkembang melalui pengajaran Al-Qur’an, tafsir, aritmatika, dan ilmu keislaman lainnya. Namun, setelah kolonialisasi Prancis, sistem pendidikan mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya bahasa dan budaya Prancis, yang mengakibatkan banyak sekolah Islam ditutup. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas perkembangan Islam di Aljazair, tetapi juga menelusuri secara lebih mendalam proses terjadinya imperialisme Prancis serta dampak yang ditimbulkannya

---

<sup>1</sup> Sjamsuddin, H, “Metodologi Sejarah”, (Yogyakarta: Ombak, 2012)

terhadap masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana awal masuknya kekuasaan Prancis, strategi kolonisasi yang digunakan, hingga perubahan struktural yang terjadi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Hal ini berbeda dengan penelitian karya Syaiful Anam yang lebih menitikberatkan pada sejarah perkembangan Islam di Aljazair serta perubahan dalam sistem pendidikan Islam, tanpa menguraikan secara rinci proses imperialisme Prancis sebagai faktor utama yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana proses masuknya Prancis ke Aljazair sejak invasi tahun 1830 yang dilatarbelakangi oleh ambisi politik, ekonomi, dan dominasi budaya, serta bagaimana bentuk imperialisme yang kemudian diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana strategi kolonial dilakukan melalui penaklukan militer, kebijakan diskriminatif, perombakan sistem pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi, hingga upaya sistematis dalam menghapus identitas keislaman dan kebangsaan masyarakat Aljazair. Selain itu, permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah apa saja dampak yang ditimbulkan dari imperialisme tersebut, baik dalam bentuk ketimpangan sosial, marginalisasi penduduk pribumi, kerusakan ekonomi akibat perampasan tanah, maupun krisis kemanusiaan yang ditandai dengan kemiskinan, kelaparan, dan kekerasan yang meluas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses masuknya Prancis ke Aljazair, bentuk-bentuk imperialisme yang diterapkan, serta menganalisis dampaknya terhadap kondisi ekonomi politik, Pendidikan, dan keagamaan masyarakat Aljazair.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Ketika melakukan sebuah penelitian, seorang sejarawan umumnya tidak benar-benar berangkat dari kondisi yang benar-benar kosong atau tanpa pengetahuan yang ia punya sebelumnya (prior knowledge). Pemahaman akan topik-topik sejarah yang ia kaji biasanya berangkat dari literatur-literatur yang ia telah baca atau ketahui sebelumnya<sup>2</sup>. Literatur tertulis berupa sumber-sumber sekunder seperti buku-buku merupakan hal yang umum yang ia baca terlebih dulu. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber atau literatur seperti skripsi, dan jurnal yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penelitian yaitu:

Pertama, skripsi berjudul “*Dampak Kebijakan Prancis Terhadap Masyarakat Aljazair 1830-1914*” oleh Silpia Ulhaq. Secara umum skripsi ini menjelaskan kondisi Aljazair yang mudah dikuasai karena tidak memiliki pemerintahan yang kuat dan terdiri dari berbagai suku sehingga

---

<sup>2</sup> Sjamsuddin, H, “Metodologi Sejarah”, (Yogyakarta: Ombak, 2012)

memudahkan Prancis untuk menguasai Aljazair. Fokus utama skripsi ini adalah mengkaji kebijakan-kebijakan Prancis serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dalam berbagai bidang. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas dampak kebijakan Prancis terhadap masyarakat Aljazair, tetapi juga menelusuri secara lebih mendalam proses terjadinya imperialisme Prancis sejak awal invasi hingga terbentuknya sistem kolonial yang menekan masyarakat lokal. Penelitian ini mengkaji dinamika awal masuknya kekuasaan Prancis, strategi penguasaan wilayah, serta faktor-faktor yang mempermudah kolonialisasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan sebab-akibat antara proses imperialisme dan dampak yang ditimbulkannya. Hal ini berbeda dengan skripsi karya Silpia Ulhaq yang lebih berfokus pada analisis kebijakan Prancis dan dampaknya saja, tanpa menguraikan secara rinci proses historis terjadinya imperialisme tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami kolonialisme Prancis di Aljazair.

Kedua, artikel berjudul "*Sejarah Perkembangan Islam di Aljazair*" oleh Syaiful Anam. Secara umum artikel ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Aljazair. Perkembangan Islam di wilayah ini tidak terlepas dari dinamika sejarah yang diwarnai oleh berbagai kekuasaan asing akibat kondisi masyarakat yang terfragmentasi dalam banyak suku. Sebelum kedatangan Prancis, pendidikan Islam berkembang melalui pengajaran Al-Qur'an, tafsir, aritmatika, dan ilmu keislaman lainnya. Namun, setelah kolonialisasi Prancis, sistem pendidikan mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya bahasa dan budaya Prancis, yang mengakibatkan banyak sekolah Islam ditutup. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas perkembangan Islam di Aljazair, tetapi juga menelusuri secara lebih mendalam proses terjadinya imperialisme Prancis serta dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana awal masuknya kekuasaan Prancis, strategi kolonialisasi yang digunakan, hingga perubahan struktural yang terjadi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Hal ini berbeda dengan penelitian karya Syaiful Anam yang lebih menitikberatkan pada sejarah perkembangan Islam di Aljazair serta perubahan dalam sistem pendidikan Islam, tanpa menguraikan secara rinci proses imperialisme Prancis sebagai faktor utama yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan landasan teori berupa teori imperialisme baru, yang sering dikaitkan dengan pemikiran David Harvey, Alex Callinicos, dan Peter Gowan. Alvian dalam artikelnya mengatakan bahwa Teori ini dipandang sebagai bagian dari kebangkitan kembali kajian imperialisme seiring menguatnya hegemoni global, khususnya Amerika Serikat, serta

berkembangnya wacana globalisasi sejak dekade 1990-an. Dalam perspektif ini, imperialisme tidak hanya dipahami sebagai upaya suatu actor, umumnya negara, dalam menguasai wilayah tertentu demi kepentingannya, tetapi juga berkaitan erat dengan logika kapitalisme, terutama dalam proses akumulasi modal<sup>3</sup>. Jika dikaitkan dengan imperialisme Prancis di Aljazair, konsep ini terlihat jelas melalui upaya Prancis dalam menguasai wilayah, sumber daya, dan sistem ekonomi Aljazair, sekaligus menata ulang struktur sosial dan politiknya guna mendukung kepentingan kolonial serta keuntungan ekonomi jangka panjang.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut pandangan Gilbert J. Garraghan, metode sejarah dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip dan langkah yang disusun secara sistematis untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai sumber sejarah, menguji keabsahannya melalui kritik, serta menghasilkan sintesis akhir yang umumnya disajikan dalam bentuk tulisan<sup>4</sup>. Sementara itu, menurut Richard F. Clarke, metode sejarah dipahami sebagai suatu sistem prosedur yang tepat untuk memperoleh kebenaran sejarah<sup>5</sup>. Tulisan ini juga menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, majalah, serta dokumen terkait tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus pada aktivitas menganalisis, menyusun, dan menafsirkan bahan-bahan pustaka guna memperoleh landasan teoretis yang relevan. Dalam penelitian ini, digunakan sumber-sumber yang kredibel, salah satunya karya seorang pengamat budaya sekaligus antropolog bernama Anthony Wilkin dengan bukunya yang berjudul *Among the Berbers of Algeria*. Buku tersebut merupakan catatan perjalanan (travelogue) yang mendokumentasikan secara rinci hasil pengamatan Wilkin selama perjalanannya di Aljazair, khususnya mengenai kehidupan, adat istiadat, sejarah, serta struktur sosial masyarakat Berber, yang kemudian dianalisis oleh penulis untuk memahami kehidupan masyarakat Aljazair.

---

<sup>3</sup> Alvian, Rizky Alif. Teori Imperialisme Baru dan Debat Marxisme-Realisme dalam Ilmu Hubungan Internasional. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 2016, 18.1: 1-17.

<sup>4</sup> Garraghan, G. J, *A Guide To Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1957)

<sup>5</sup> S.J, R. F, *Manuals Of Catholic Philosophy Logic*, (London: Longmans, Green & CO, 1889)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1 Proses Masuknya Prancis Ke Al-Jazair

Aljazair atau dalam bahasa Arab sering disebut Al-Jumhūrīyah al-Jazā'irīyah ad-Dīmuqrāṭīyah ash-Shabīyah (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) merupakan salah satu wilayah dari kawasan Afrika Utara. Aljazair terletak di belahan Afrika Utara yang berbatasan dengan laut Mediterania. Karena letak geografis ini, Aljazair menjadi sumber daya alam yang sangat berlimpah dibanding dengan kawasan Afrika Utara yang lainnya<sup>6</sup>

Aljazair merupakan bagian dari kawasan Maghrib secara geografis, ekonomi, dan etnis, yang mencakup wilayah Muslim dari Libya bagian barat hingga Samudera Atlantik. Secara etnis, penduduk Muslim di Aljazair terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu orang Arab dan Berber.<sup>7</sup> Suku Berber merupakan penduduk asli wilayah ini. Sepanjang sejarahnya, Aljazair telah beberapa kali berada di bawah kekuasaan bangsa asing, yang sebagian besar disebabkan oleh kondisi internal masyarakatnya yang terpecah dalam berbagai kelompok suku.

Bangsa Funisia dan Romawi termasuk di antara kekuatan asing yang pernah menguasai wilayah Aljazair. Funisia menguasai wilayah ini sekitar tahun 1000 SM, diikuti oleh kekuasaan Romawi pada tahun 146 SM. Kemudian, pada tahun 682 Masehi, terjadi ekspansi besar oleh bangsa Arab di bawah kekuasaan Dinasti Umayyah. Dalam proses tersebut, mereka berhasil menaklukkan wilayah Spanyol dengan bantuan suku Berber, dan sejak saat itu, ajaran Islam mulai tersebar luas dan menjadi agama dominan di Aljazair hingga kini.<sup>8</sup>

Sepanjang sejarah penyebaran Islam, Aljazair kembali mengalami berbagai bentuk dominasi oleh bangsa asing maupun dinasti-dinasti yang silih berganti.<sup>9</sup> Pada tahun 1525, wilayah ini dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani melalui dua bersaudara, Khayruddin dan Aruj, yang dikenal dengan julukan Barbarossa. Mereka berhasil membebaskan Aljazair dari pengaruh Spanyol, dan menjadikannya bagian dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Sejak saat itu, Aljazair menjadi pusat pemerintahan wilayah tersebut di bawah kendali Utsmani. Sebelum kedatangan Utsmani, kepemimpinan di Aljazair berada di tangan para

---

<sup>6</sup> Sihbudi, Riza; Djafar, Zainuddin. *Profil Negara-negara Timur Tengah*. (Jakarta:Pustaka Jaya), 1995.

<sup>7</sup> Anthony Wilkin, *Among The Berber of Algeria*, (London:T. Fisher Unwin, 1900) hlm 4

<sup>8</sup> Sunanto, Musyrifah., *Sejarah Islam klasik dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam* (Jakarta: kencana Pradana media group 2004)

<sup>9</sup> Philip K. Hitti, *History of Arabs*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2022) hlm 906

kepala suku, pemimpin lokal, dan tokoh-tokoh tarekat. Namun setelah tahun 1529, sistem pemerintahan berubah, di mana kekuasaan dibagi antara pemimpin militer dari kelompok Janissary yang bergelar Bey, dan pemimpin keagamaan atau hukum yang disebut Qadi, yang masing-masing memimpin wilayahnya sendiri.<sup>10</sup>

Kemunduran Kesultanan Turki Utsmani turut disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam menjaga stabilitas dan mengawasi wilayah-wilayah kekuasaannya, sehingga banyak daerah jajahan dengan mudah melepaskan diri dari pengaruhnya. Selain itu, ekspansi kekuatan Eropa menjadi faktor penting yang mempercepat kemunduran Turki Utsmani dan membuka peluang bagi Prancis untuk memperluas pengaruhnya di Aljazair.

Meskipun Turki Utsmani sempat berusaha menghadang masuknya pasukan Eropa yang datang secara masif ke wilayah Afrika Utara, termasuk Aljazair, faktor geografis yang lebih dekat dengan Eropa menyebabkan mereka kesulitan untuk mempertahankan kontrol penuh atas kawasan tersebut. Memasuki abad ke-18 Masehi, kekuatan politik dan militer Turki Utsmani semakin melemah, sehingga Prancis dengan mudah dapat memasuki dan menguasai wilayah Aljazair.

Pada tahun 1830, Prancis mengalami kemunduran akibat kekalahannya dalam konflik melawan Yunani. Untuk mengalihkan perhatian dari krisis ekonomi yang sedang melanda, Raja Prancis mengutus Charles X untuk melancarkan serangan ke Aljazair. Awalnya, tujuan Prancis hanya sebatas menguasai beberapa kota di wilayah pesisir.<sup>11</sup> Namun, melemahnya kekuasaan Turki Utsmani pada saat itu memberikan peluang bagi Prancis untuk memperluas kekuasaannya dan akhirnya menguasai Aljazair secara keseluruhan.

Penaklukan Prancis terhadap Aljazair pada awal abad ke-19 bukan sekadar upaya ekspansi wilayah, tetapi juga hasil dari krisis politik internal yang dihadapi Prancis. Awal mula kekerasan colonial dilakukan Prancis di Aljazair pada masa perang Prancis–Aljazair pertama yang berlangsung antara tahun 1830 hingga 1848. Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya berarti peperangan secara fisik, tetapi juga mencakup bentuk penaklukan politik, ekonomi, dan budaya yang dilakukan Prancis terhadap rakyat Aljazair.<sup>12</sup> Awalnya, Prancis hanya berniat menguasai wilayah pesisir utara yang disebut Tell, namun setelah berhasil menaklukkan berbagai kelompok perlawanan bersenjata, mereka memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah Sahara. Kekerasan yang dilakukan oleh tentara Prancis pada masa

---

<sup>10</sup> Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Penerbit Mizan, 2001.

<sup>11</sup> Maryam, Siti. *Sejarah peradaban Islam: Dari masa klasik hingga modern*. Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

<sup>12</sup> France, Anatole. *The Gods Will Have Blood:(les Dieux Ont Soif)*. Penguin, 1990.

penaklukan tersebut kemudian menjadi pola umum dalam praktik kolonialisasi mereka di Afrika Utara.<sup>13</sup>

Latar belakang perang ini sebenarnya tidak murni didorong oleh kepentingan strategis atau ekonomi semata, melainkan berakar dari situasi politik dalam negeri Prancis yang sedang tidak stabil. Setelah Revolusi Prancis dan jatuhnya monarki, Raja Charles X dari Dinasti Bourbon berusaha mengembalikan kejayaan monarki yang telah runtuh akibat perubahan sosial dan politik yang dibawa oleh revolusi. Untuk mendapatkan kembali dukungan rakyat dan memperkuat legitimasi kekuasaannya, Charles X menggunakan ekspedisi militer ke Aljazair sebagai sarana politik. Dengan menabuh genderang perang di luar negeri, ia berharap dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari krisis internal dan menumbuhkan rasa nasionalisme melalui kejayaan militer. Oleh karena itu, ekspedisi ke Aljazair lebih bersifat politis daripada strategis, bahkan sejak awal tidak memiliki tujuan yang jelas selain menunjukkan bahwa Prancis masih merupakan negara besar dan berpengaruh.<sup>14</sup>

Selain itu, kebijakan Charles X juga dipengaruhi oleh warisan ideologis dari era Napoleon Bonaparte. Setelah Revolusi Prancis, muncul gagasan bahwa perang dapat menjadi sarana moral dan ideologis untuk “membebaskan” rakyat dari tirani, bukan sekadar perebutan wilayah. Napoleon menerapkan gagasan tersebut dalam ekspedisinya ke Mesir pada tahun 1798 dengan dalih menyebarkan semangat pencerahan dan membebaskan rakyat dari kekuasaan Mamluk serta Ottoman. Ide tentang “internasionalisme yang tercerahkan” ini kemudian diwarisi oleh Prancis dan menjadi pembenaran moral bagi proyek kolonial mereka, termasuk di Aljazair. Namun, dalam kenyataannya, semangat pembebasan itu berubah menjadi bentuk baru dari penindasan dan kekerasan yang dilakukan atas nama kemajuan dan peradaban.<sup>15</sup>

Di bawah pengaruh pemikiran Napoleon Bonaparte, Prancis membangun narasi kolonialnya dengan balutan ide-ide kemanusiaan, modernitas, dan peradaban. Pada masa itu, Bonaparte menganggap bahwa bangsa-bangsa di dunia, termasuk di Timur Tengah dan Afrika Utara, memiliki kepentingan yang sama dalam melawan kebodohan, penderitaan, dan tirani. Ia percaya bahwa nilai-nilai Revolusi Prancis tahun 1789, seperti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bisa menciptakan perdamaian yang luhur di wilayah Mediterania. Namun, di balik semangat itu,

---

<sup>13</sup> Farge, Arlette. *Subversive words: public opinion in eighteenth-century France*. Penn State Press, 1995.

<sup>14</sup> Mayer, Arno J. *The persistence of the ancien regime* (New York: Pantheon). 1981.

<sup>15</sup> Perry, Anderson. *Internationalism: a breviary*. *New Left Review*, 2002, 14: 5-25.

terselip kepentingan kolonial yang kuat. Meskipun Bonaparte menyerukan patriotisme kepada rakyat Mesir untuk melawan Mamluk dan Ottoman, sebenarnya ia tidak mendukung gagasan kemandirian bangsa Mesir. Hal itu terlihat jelas dari tindakan brutalnya ketika menumpas pemberontakan rakyat Kairo pada tahun 1798. Dengan kata lain, semboyan “pembebasan” yang ia bawa hanyalah kedok bagi ambisi kolonial Prancis.<sup>16</sup>

Tiga dekade kemudian, saat Prancis kembali melakukan ekspansi ke Aljazair, para jenderalannya membawa kembali retorika yang sama. Mereka meniru bahasa dan semangat “pembebasan” yang pernah digunakan Bonaparte di Mesir, seolah-olah kedatangan mereka adalah untuk membantu, bukan menaklukkan. Contohnya terlihat pada proklamasi Jenderal de Bourmont tahun 1830 yang ditujukan kepada rakyat Aljazair. Dalam dokumen itu, ia menegaskan bahwa Prancis tidak datang untuk memerangi rakyat, melainkan untuk membebaskan mereka dari tirani penguasa Ottoman. Ia menggambarkan penguasa Aljir sebagai sosok lalim yang hidup dalam kemewahan sementara rakyat menderita. Bahkan, teks itu ditutup dengan pernyataan bahwa Tuhan sendiri telah memerintahkan jatuhnya kekuasaan Ottoman demi membebaskan rakyat dari penderitaan. Melalui konvensi 5 Juli 1830, Prancis menegaskan bahwa mereka akan membangun pemerintahan yang adil, menghormati agama Islam, menjaga hak milik rakyat, dan melindungi kehormatan perempuan. Semua janji itu digunakan untuk menampilkan wajah “manusiawi” kolonialisme Prancis, seolah-olah mereka datang bukan untuk menindas, tetapi untuk membawa peradaban.<sup>17</sup>

Namun, di balik narasi moral dan “misi peradaban” itu, tersimpan kontradiksi besar. Klaim Prancis tentang penghormatan terhadap budaya dan agama lokal hanyalah upaya untuk membedakan diri dari perang agama masa lalu, seperti Perang Salib. Menteri perang Prancis, Marsekal Soult, bahkan menyebut ekspedisi ke Aljazair sebagai “penaklukan peradaban yang damai.” Ia ingin menegaskan bahwa Prancis bukan penakluk brutal, melainkan pembawa kemajuan. Akan tetapi, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: kolonialisme Prancis di Aljazair tetap diwarnai oleh kekerasan, perampasan tanah, dan penindasan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Perry, Anderson. *Internationalism...*

<sup>17</sup> Ozouf, Mona. *Festivals and the French revolution*. Harvard University Press, 1991.

<sup>18</sup> Brown, Wendy. *Regulating aversion: Tolerance in the age of identity and empire*. 2009.

## 2 Imperialisme Prancis di Aljazair

Pada awal kedatangannya, Prancis menyatakan bahwa tujuan mereka adalah membebaskan Aljazair dari kekuasaan Turki Utsmani. Namun di balik pernyataan tersebut, tersembunyi agenda lain yang berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan ekspansi imperialisme.<sup>19</sup> Secara bertahap, pengaruh Prancis mulai meluas ke berbagai aspek kehidupan di Aljazair, sebagai bagian dari upaya untuk menghapus sisa-sisa pengaruh Kesultanan Utsmani yang masih kuat di wilayah tersebut.

Pada masa awal kedatangan Prancis, Aljazair masih berada di bawah kendali sejumlah suku dan para pemimpin sufi yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Namun setelah Prancis berhasil menguasai wilayah ini secara menyeluruh, berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan drastis, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam membentuk struktur pemerintahan kolonial, Prancis sengaja tidak memilih pemimpin dari kalangan sufi yang memiliki kedekatan dengan rakyat, melainkan menunjuk tokoh-tokoh yang tidak terlalu berpengaruh. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan kolonial dapat diberlakukan dengan mudah tanpa perlawanan berarti.

Sebelum penjajahan Prancis, sistem pendidikan di Aljazair berfokus pada pengajaran ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, tafsir, aritmatika, dan ilmu agama lainnya. Namun setelah Prancis menetapkan kebijakan baru, sistem pendidikan diubah total dengan memasukkan bahasa dan budaya Prancis sebagai dasar pembelajaran. Akibatnya, banyak sekolah tradisional ditutup, dan akses pendidikan menjadi sangat terbatas. Hanya anak-anak dari keluarga elit yang mampu melanjutkan pendidikan, sedangkan mayoritas anak-anak pribumi kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Situasi ini diperburuk oleh kedatangan besar-besaran warga Prancis ke Aljazair, yang secara tidak langsung semakin memperkecil ruang bagi penduduk lokal dalam mengakses pendidikan.

Pada tahun 1847, muncul konflik sosial yang disebabkan oleh kebijakan diskriminatif yang lebih mengutamakan kepentingan para pendatang daripada rakyat Aljazair sendiri. Pembatasan dalam bidang perdagangan turut memperparah kondisi ekonomi masyarakat lokal, yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Kesulitan ini berlangsung selama lebih dari satu abad, yaitu selama 132 tahun masa penjajahan. Ketimpangan dalam akses pendidikan dan lapangan pekerjaan membuat kebodohan dan kemiskinan meluas. Seluruh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Prancis hanya ditujukan untuk

---

<sup>19</sup> Camille Rouseet, *Conquete De L Algeria 1841-1887* ( Paris: Librairie Plon,1889) hlm 55-57

memenuhi kepentingan mereka sendiri, dengan menjadikan Aljazair sebagai sumber eksploitasi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam kondisi yang semakin sulit bagi rakyat lokal, Prancis perlahan-lahan mencoba menghilangkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat, termasuk oleh komunitas Berber. Seluruh penduduk dipaksa untuk menggunakan bahasa Prancis dalam kehidupan sehari-hari. Kekuasaan kolonial tidak hanya berhenti pada aspek budaya dan bahasa; demi menarik lebih banyak imigran dari Eropa, Prancis menawarkan tanah-tanah subur dan strategis di Aljazair sebagai daya tarik bagi warganya untuk bermigrasi dan menetap di wilayah jajahan tersebut.<sup>20</sup> Tanah-tanah subur milik rakyat Aljazair dirampas dan dijual secara paksa oleh pihak kolonial Prancis dengan harga yang sangat rendah. Sementara itu, kondisi masyarakat lokal sangat memprihatinkan mereka dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan dipindahkan ke wilayah-wilayah yang kering dan tidak subur.

Dikatakan bahwa imperialisme Prancis terhadap Aljazair sangatlah kejam, bahkan sulit untuk dinarasikan secara utuh dalam sejarah. Selama empat dekade perang kolonial yang dilakukan Prancis untuk menaklukkan perlawanan rakyat Aljazair (1830–1875), tercatat bahwa hampir sepertiga penduduk asli Aljazair meninggal dunia. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai tragedi seperti pembantaian, serangan militer, wabah penyakit, dan kelaparan menyebabkan sekitar satu juta jiwa dari total tiga juta penduduk Aljazair kehilangan nyawa<sup>21</sup> Sekitar 825.000 penduduk Aljazair tewas akibat kekerasan yang terjadi selama empat puluh lima tahun pertama masa pendudukan Prancis. Jumlah korban yang hampir sama juga meninggal dunia karena kelaparan dan wabah penyakit, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan ekonomi drastis akibat kebijakan kolonial yang diterapkan terhadap masyarakat Aljazair.<sup>22</sup>

Kejatuhan Aljir bukan sekadar peristiwa militer atau “awal kebangkitan kemarahan Muslim” seperti sering digambarkan dalam narasi Barat, melainkan peristiwa traumatis yang menghancurkan kehidupan masyarakat Aljazair. Setelah penandatanganan Konvensi 5 Juli 1830 yang seharusnya mengakhiri perang, tentara Prancis justru melakukan penjarahan besar-besaran terhadap kekayaan kota, properti warga, dan lembaga keagamaan. Tentara dan pejabat Prancis merampas harta kekayaan Aljir, menghancurkan masjid, rumah, dan

---

<sup>20</sup> Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Dunia Islam Jilid 3*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2002.

<sup>21</sup> Jarvis, Jill. *Decolonizing Memory: Algeria and the Politics of Testimony*. Duke University Press, 2021.

<sup>22</sup> Brower, Benjamin Claude. *A desert named peace: the violence of France's empire in the Algerian Sahara, 1844-1902*. Columbia University Press, 2011.

lingkungan kota, serta menyita tanah dan bangunan milik umat Islam melalui dekrit pemerintah kolonial. Akibat kekerasan dan penghancuran tersebut, penduduk Aljir menurun drastis, dari sekitar 30–40 ribu jiwa menjadi hanya sekitar 12 ribu pada tahun 1834. Banyak warga yang melarikan diri karena kehilangan tempat tinggal dan rasa aman.<sup>23</sup>

Kekerasan yang dilakukan Prancis di Aljazair pada awal masa penjajahan memiliki dampak besar terhadap cara mereka membangun kekuasaan kolonial. Awalnya, penaklukan Aljazair dianggap sah menurut standar zaman itu. Prancis menggunakan alasan insiden kecil tahun 1827, ketika seorang pejabat Turki Utsmani menampar wajah konsul Prancis dengan kipas sebagai pembenaran untuk melancarkan perang dan merebut Aljazair. Setelah kota itu jatuh, dibuatlah sebuah perjanjian damai atau konvensi yang seharusnya menjamin keamanan, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak warga Muslim setempat. Tapi kenyataannya berbeda. Tentara Prancis justru mengabaikan isi perjanjian tersebut. Mereka bertindak seolah hukum tidak berlaku bagi mereka sendiri. Dari situ mulai terlihat bahwa pemerintahan kolonial yang dibangun Prancis bukanlah pemerintahan yang berlandaskan hukum dan persetujuan rakyat, melainkan kekuasaan yang ditegakkan dengan kekerasan dan ketakutan.

Situasi semakin memburuk ketika peristiwa penjarahan brutal terjadi di kota Blida pada November 1830, sekitar 60 kilometer dari Aljir. Pasukan Prancis yang dipimpin oleh Jenderal Bertrand Clauzel datang dan langsung melakukan pembunuhan besar-besaran. Mereka menembak dan menusuk warga sipil tanpa pandang bulu, bahkan banyak yang dibunuh hanya karena berada di tempat kejadian. Pembantaian ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan lagi alat perang semata, melainkan pesan politik yang ingin disampaikan oleh Prancis: bahwa mereka berkuasa penuh dan siapa pun yang menentang akan dihancurkan. Dari sinilah terlihat bahwa kekerasan dijadikan simbol dominasi kolonial, cara untuk menanamkan rasa takut sekaligus menegaskan bahwa rezim baru tidak lagi tunduk pada hukum atau moralitas, tapi pada kekuatan mutlak yang mereka miliki.<sup>24</sup>

Pembantaian itu berlangsung selama berjam-jam dan menewaskan ratusan warga sipil yang sama sekali tidak bersenjata. Awalnya, pasukan Prancis menyerang kota tersebut dan membunuh banyak orang tanpa alasan yang jelas. Beberapa hari kemudian, setelah sekelompok kecil tentara Prancis diserang balik, mereka membalas dengan cara yang jauh lebih sadis, mereka membunuh sekitar delapan ratus penduduk Blida hanya karena dua puluh

---

<sup>23</sup>Brower, Benjamin Claude. *A desert....*

<sup>24</sup>Brower, Benjamin Claude. *A desert....*

satu tentara Prancis tewas dalam pertempuran. Tindakan ini benar-benar tidak manusiawi dan tidak sebanding. Bahkan media militer Prancis sendiri, *Le Spectateur militaire*, menulis laporan yang mengkritik keras peristiwa itu, mengatakan bahwa seluruh warga Blida diperlakukan seperti musuh perang, padahal mereka bukan tentara. Setelah pembantaian selesai, kota itu benar-benar hancur dan kosong, seolah-olah tidak pernah ada kehidupan di sana.<sup>25</sup>

Bagi mereka yang berhasil selamat, kondisi mereka sangat mengenaskan. Tubuh penuh luka, wajah trauma, dan rasa takut yang mendalam menjadi bukti nyata betapa mengerikannya kekuatan kolonial Prancis saat itu. Pembantaian ini bukan sekadar aksi balas dendam atau operasi militer biasa, tapi lebih sebagai cara Prancis menunjukkan kekuasaan dan menanamkan rasa takut kepada rakyat Aljazair. Kekerasan itu dijadikan semacam “pesan politik” bahwa siapa pun yang berani melawan akan berakhir seperti penduduk Blida. Dalam konteks ini, tubuh para korban menjadi semacam simbol penderitaan dan peringatan akan kekuasaan baru yang mutlak, dingin, dan tanpa belas kasihan. Teks ini ingin menunjukkan bahwa kolonialisme Prancis di Aljazair dibangun bukan lewat hukum dan keadilan, tapi lewat kekerasan dan teror yang sengaja diciptakan untuk menundukkan rakyat.

Setelah merasakan semua itu, muncul perlawanan-perlawanan dari rakyat Aljazair yang berlangsung sengit. Serangan yang terus-menerus membuat pasukan Prancis kewalahan. Para pejuang Aljazair membangun basis perlawanan di kota Mascara dan Oran, yang kemudian mendorong Prancis untuk mengadakan perjanjian pembagian wilayah, memberikan sebagian daerah tengah dan barat kepada kelompok pejuang Aljazair. Pada tahun 1832, muncul perlawanan dari rakyat Aljazair yang dipimpin oleh Abdul Qadir. Ia menyatakan dirinya sebagai pemimpin bangsa Arab dan bertanggung jawab menegakkan hukum Islam di wilayah tersebut serta menentang kolonialisme Prancis. Perjuangannya menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap rakyat Aljazair.<sup>26</sup> Namun, meskipun upaya perlawanan cukup kuat, pada akhirnya seluruh kekuatan bersenjata, termasuk pasukan Abdul Qadir, berhasil dihancurkan oleh militer Prancis, sehingga Aljazair sepenuhnya jatuh ke dalam kekuasaan kolonial.

Namun, ketika Jenderal Bugeaud memimpin pasukan Prancis, kekuatan militer kolonial semakin bertambah besar. Ia berambisi menaklukkan seluruh wilayah Aljazair. Serangan demi serangan pun terus dilancarkan terhadap pasukan perlawanan yang dipimpin

---

<sup>25</sup>Brower, Benjamin Claude. *A desert....*

<sup>26</sup> Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: PT raja grafindo, 1999) jilid 3 hlm 203

oleh Abdul Qadir. Pada akhirnya, kekuatan Aljazair mengalami kemunduran banyak pasukan yang terbunuh dan para pemimpinnya ditangkap atau diasingkan. Kondisi ini membuat Prancis berhasil menguasai Aljazair secara penuh.

Prancis mulai mengambil alih kekuasaan di Aljazair dengan menerapkan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan sistem hukum dan aturan yang berlaku di Prancis. Di bawah kepemimpinan Jenderal Bugeaud, hak-hak rakyat Aljazair dirampas secara paksa. Salah satu langkah awal kolonisasi adalah gelombang migrasi besar-besaran dari warga Eropa, khususnya dari Prancis, Italia, dan Spanyol. Pada tahun 1847, jumlah imigran Eropa yang menetap di Aljazair mencapai sekitar 109.000 jiwa. Pada masa ini, mulai terjadi percampuran melalui pernikahan antara para imigran dan penduduk lokal Aljazair.<sup>27</sup>

Meskipun Islam tetap menjadi agama mayoritas di Aljazair, kedatangan para pendatang Eropa menyebabkan munculnya komunitas baru, termasuk komunitas Yahudi yang mulai berkembang. Seluruh warga Eropa yang tinggal di Aljazair secara otomatis diberikan status kewarganegaraan Prancis. Dalam kehidupan sehari-hari, para imigran tetap mempertahankan bahasa ibu mereka dan menjalani gaya hidup layaknya di kota asal mereka di Eropa, meskipun sektor utama perekonomian di Aljazair saat itu adalah pertanian.

Sementara itu, penduduk asli Aljazair yang mayoritas beragama Islam masih menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama mereka, yang sebelumnya merupakan bahasa resmi. Meskipun berada di bawah tekanan kekuasaan kolonial, umat Muslim tetap berupaya menjalankan ibadah mereka, meskipun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena situasi yang represif.<sup>28</sup>

### **3 Dampak Imperialisme Prancis Terhadap Aljazair**

#### **a. Bidang Politik Ekonomi**

Rakyat Aljazair melakukan berbagai bentuk pemberontakan sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan kolonial Prancis. Meskipun gerakan-gerakan perlawanan tersebut berlangsung secara terus-menerus, mayoritas berakhir dengan kekalahan, yang pada akhirnya melemahkan posisi pertahanan rakyat. Situasi ini memberi peluang bagi Prancis untuk memperkuat kontrolnya atas wilayah Aljazair.

Seluruh bentuk perlawanan dibasmi oleh Prancis, memungkinkan mereka dengan mudah merebut dan menguasai seluruh wilayah Aljazair. Langkah awal yang ditempuh oleh

---

<sup>27</sup> Tohir, Ajid, *Studi Kawasan Dunia Islam* (Jakarta :PT raja grafindo, 2009)

<sup>28</sup> Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2008)

Prancis adalah mereformasi sistem pemerintahan yang ada dengan menggantinya menggunakan struktur dan pejabat yang ditunjuk langsung oleh otoritas kolonial. Minimnya pertahanan dari pihak Aljazair memudahkan Prancis dalam melaksanakan perubahan mendasar, baik di bidang pemerintahan maupun perekonomian.

Dominasi Prancis menyebabkan pemerintahan di Aljazair menjadi tidak otonom, karena seluruh kebijakan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat di Paris. Para pemimpin yang ditunjuk Prancis umumnya tidak memiliki kedekatan ataupun kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat lokal, sehingga mereka mudah dikendalikan oleh otoritas kolonial.

Eksplorasi terhadap penduduk lokal menjadi strategi utama Prancis untuk memperkuat kekuasaan. Keamanan yang sebelumnya dirasakan masyarakat pada masa pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah hilang sepenuhnya. Tidak ada perlindungan hukum maupun sosial bagi rakyat pribumi, terutama komunitas Muslim dan petani desa yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian.

Prancis juga mengubah sistem ekonomi ke arah pasar bebas bergaya Eropa. Para petani dipaksa beradaptasi dengan sistem ini, dan tanah-tanah subur milik mereka banyak yang dirampas. Sebagian petani beralih ke perdagangan, sementara sebagian lain tetap bertani di lahan tandus yang tersisa, dengan hasil yang sangat minim. Kekayaan sumber daya alam Aljazair tidak dinikmati oleh rakyat, karena semuanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan milik Prancis. Akibatnya, penduduk asli mengalami kemiskinan struktural, tidak memiliki penghasilan tetap, sementara kaum imigran mendominasi ekonomi dan fasilitas publik.<sup>29</sup>

Setelah kemerdekaan, kondisi ekonomi rakyat Aljazair masih terpuruk. Mayoritas penduduk tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai petani. Pada tahun 1962, sekitar seperempat penduduk pindah ke kota dan bekerja sebagai buruh dengan upah rendah. Dari 10 juta penduduk Muslim, hanya sekitar 9 juta yang tersisa akibat korban jiwa dalam perjuangan melawan kolonialisme Prancis.

Dalam periode pascakemerdekaan, muncul kelas sosial baru di wilayah perkotaan yang terdiri dari penduduk yang sebelumnya mendapat fasilitas dan akses pendidikan dari Prancis. Kelompok elite ini tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan memburuknya kondisi sosial-ekonomi. Meskipun melek huruf, pengetahuan agama mereka terbatas pada tradisi Islam lisan.

Sebagian dari golongan elite ini tetap berharap agar Aljazair menjadi bagian dari

---

<sup>29</sup> Levy, Michael, *The History of Africa*, (New York: Britannica Educational Publishing, 2010), hlm 66

Prancis, meskipun secara politik sudah merdeka. Dukungan terhadap ide ini datang dari kalangan terdidik seperti akademisi, dokter, dan tokoh-tokoh lembaga pendidikan. Pemikiran ini antara lain diwakili oleh Ferhat Abbas yang bersikap pro-Prancis.

Sebaliknya, kelompok ulama fundamentalis Aljazair dengan tegas menolak gagasan bahwa Aljazair seharusnya menjadi bagian dari Prancis. Mereka merujuk pada ajaran Islam klasik yang membedakan status hukum antara umat Muslim dan non-Muslim. Pandangan ini dikemukakan oleh Abd al-Hamid Ibn Badis melalui dokumen *CARTA*, yang menjadi landasan perjuangan untuk mempertahankan identitas Islam di Aljazair. Perkembangan ekonomi yang terjadi selama masa penjajahan Prancis membawa kemajuan secara bertahap di sektor perdagangan. Masyarakat Aljazair mulai menyesuaikan diri dengan peran sebagai pedagang, terutama melalui pasokan barang dari wilayah pedesaan. Meskipun harus bersaing dengan para imigran Prancis, penduduk lokal tetap dapat menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara berdampingan. Kemunculan kelompok masyarakat perkotaan yang baru membuka peluang bagi rakyat Aljazair untuk mulai mengambil alih peran-peran dalam pemerintahan yang sebelumnya didominasi oleh pihak kolonial.<sup>30</sup>

#### **b. Bidang Pendidikan**

Minimnya akses pendidikan di Aljazair menyebabkan tingginya angka buta huruf di kalangan masyarakat. Pengetahuan agama pun sebagian besar disampaikan secara lisan, tanpa sistem pendidikan formal. Para misionaris Prancis memanfaatkan kondisi ini dengan mendekati lembaga pendidikan dan anak-anak, sehingga secara perlahan mereka mulai tertarik dan menyukai budaya Prancis. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa banyak anak-anak tersebut tinggal dan belajar di lingkungan yang didominasi oleh imigran Prancis.

Sementara itu, para pelajar lokal masih menekuni pelajaran tradisional seperti tafsir Al-Qur'an. Perbedaan signifikan pun muncul antara pelajar yang mengenyam pendidikan di bawah sistem kolonial Prancis dengan pelajar yang tetap berada dalam lingkungan pendidikan tradisional Aljazair. Tercatat sekitar 25 dokter, pengacara, insinyur, dan profesor, 200 guru sekolah menengah, serta sekitar 1.000 intelektual merupakan lulusan pendidikan ala Prancis. Di sisi lain, terdapat pula lulusan dari sekolah-sekolah di Aljir, Konstantin, dan Tlemcen yang masih berpegang pada nilai-nilai Islam awal, kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar kehidupan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: PT raja grafindo, 1999) jilid 3 hlm 203

<sup>31</sup> Samir Amin, *The Maghreb In The Modern World Algeria-Tunisia-Maroco*, (Australia:Penguin Book, 1970), hlm 98

Dari latar pendidikan ini, terbentuk dua arus pemikiran utama. Kelompok pertama berasal dari kalangan pelajar yang dididik dalam sistem Prancis. Mereka cenderung mendukung gagasan agar Aljazair tetap menjadi bagian dari Prancis. Pandangan ini diperkuat oleh janji kesejahteraan dan kemajuan yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial. Salah satu tokoh yang mewakili pemikiran ini adalah Ferhat Abbas, seorang tokoh sekularis dan lulusan sekolah Prancis. Abbas berpendapat bahwa kejayaan peradaban Arab dan Islam adalah masa lalu, sedangkan masa depan Aljazair terletak pada integrasinya dengan Prancis.

Sebaliknya, kelompok pelajar lokal menginginkan kemerdekaan penuh bagi Aljazair dan menuntut agar Prancis mengakui Aljazair sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tokoh utama dari kelompok ini adalah Abd al-Hamid Ibn Badis, seorang ulama reformis dan ketua Himpunan Ulama Aljazair. Ibn Badis lahir di Konstantin dari keluarga Berber dan dikenal sebagai pendidik yang mempromosikan nasionalisme berbasis nilai-nilai Arab dan Islam. Selama masa kolonial, Prancis berupaya menekan pendidikan Islam dan Arab dengan menutup lembaga pendidikan serta membatasi penggunaan bahasa Arab dan pengajaran Al-Qur'an. Kebijakan ini berdampak negatif terhadap masyarakat dan menjadi latar belakang munculnya gerakan reformasi pendidikan oleh Ibn Badis, yang bertujuan untuk mempertahankan integritas budaya rakyat Aljazair.<sup>32</sup>

Upaya Prancis dalam menghancurkan elite tradisional telah melahirkan kelompok elite baru, yang berasal dari pegawai pemerintah seperti guru, apoteker, dan pegawai pos. Kelompok inilah yang menjadi embrio organisasi-organisasi baru, yang melahirkan generasi muda bersemangat nasionalis dan mencintai tanah airnya, Aljazair. Berbagai kebijakan kolonial yang diterapkan Prancis justru memicu tumbuhnya kesadaran nasional dan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat Aljazair. Hal ini menciptakan perbedaan mencolok antara pelajar dari sekolah Prancis dan sekolah lokal. Dari latar belakang inilah muncul berbagai ideologi lokal, sebagian bahkan mendapat dukungan dana dari Prancis. Namun pada akhirnya, kondisi ini turut melahirkan tokoh-tokoh nasional yang mampu memimpin Aljazair menuju masa depan yang merdeka.

### **c. Bidang Keagamaan**

Mayoritas masyarakat Muslim di Aljazair menganut ajaran Sunni Ortodoks dan menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan hukum Islam Mazhab Maliki. Tradisi keagamaan di wilayah ini memiliki karakteristik khas, salah satunya adalah penghormatan terhadap tokoh-

---

<sup>32</sup> John L Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung:Mizan, 2001)hlm 107

tokoh sufi yang dianggap sebagai individu suci, serta berkembangnya gerakan persaudaraan berbasis keagamaan. Keberagaman etnis di Aljazair menyebabkan tokoh-tokoh sufi tersebar dan teridentifikasi berdasarkan afiliasi kesukuan masing-masing. Para tokoh sufi, yang dikenal dengan sebutan *Marabout*, dianggap sebagai panutan dalam menjalani kehidupan beragama dan sosial masyarakat Muslim Aljazair. Ajaran *Maraboutisme* ini berasal dari tradisi Andalusia yang dibawa dari Semenanjung Iberia. Mereka membentuk organisasi-organisasi yang berperan dalam memperkuat gerakan Islam, serta berkontribusi besar dalam penyebaran agama, pengembangan ilmu pengetahuan, serta aktivitas politik dan sosial ekonomi.<sup>33</sup>

Di sisi lain, para misionaris Kristen dari Prancis berhasil mengonversi sebagian penduduk Aljazair menjadi pemeluk agama Kristen, terutama melalui pengaruh lembaga pendidikan. Anak-anak diajarkan doktrin Kristen sejak dini, yang kemudian memengaruhi keyakinan mereka. Kurangnya pemimpin yang mampu mempersatukan masyarakat turut memudahkan Prancis menyebarkan pengaruhnya di tengah masyarakat lokal. Meski demikian, Islam tetap menjadi agama mayoritas di Aljazair. Terdapat perbedaan signifikan antara masyarakat yang tinggal di kota besar dan kota kecil. Warga Muslim di kota-kota besar tetap menganut Islam, namun gaya hidup mereka menunjukkan pengaruh kuat budaya Barat, terutama melalui penggunaan bahasa Prancis dalam kehidupan sehari-hari sebuah warisan dari masa kolonial. Sebaliknya, masyarakat di kota-kota kecil masih mempertahankan nilai-nilai keislaman yang kental dan menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi utama.

Tekanan kolonial Prancis akhirnya memunculkan kesadaran dari kalangan cendekiawan Muslim. Salah satu tokoh penting dalam kebangkitan intelektual ini adalah Ibn Badis, yang memprakarsai gerakan reformasi Islam. Ia mendirikan sekolah-sekolah yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum, seperti pengajaran Al-Qur'an, bahasa Arab, sejarah nasional, lagu-lagu patriotik, bahasa Prancis, geografi, dan aritmatika.<sup>34</sup>

Tujuan utama Ibn Badis adalah membangkitkan kembali pendidikan di Aljazair dengan memberikan akses belajar bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan. Ia juga mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya yang bertindak sebagai donatur. Upaya keras ini mulai membuahkan hasil jumlah siswa yang ia didik terus bertambah, dan perlahan-lahan mampu melawan kebijakan Prancis yang berusaha membatasi pendidikan rakyat

---

<sup>33</sup> Philip K. Hitti, *History of Arabs*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2022) h 906

<sup>34</sup> John L Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001) h.107

Aljazair. Anak-anak pun mulai kembali mempelajari Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Perkembangan ini mendorong munculnya kelompok pemikir dari kalangan penduduk lokal yang kemudian membentuk gerakan untuk membebaskan Aljazair dari penjajahan Prancis. Meskipun kondisi negara belum sepenuhnya stabil, terdapat kemajuan berarti dalam bidang pendidikan. Bahkan, masjid-masjid yang sebelumnya dibatasi fungsinya mulai kembali diaktifkan, seiring dengan meningkatnya semangat para pelajar untuk menuntut ilmu.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masuknya Prancis ke Aljazair pada tahun 1830 dilatarbelakangi oleh ambisi politik, krisis internal Prancis, serta melemahnya kekuasaan Turki Utsmani, yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan ekspansi kolonial dengan dalih “membebaskan” Aljazair. Dalam proses imperialismenya, Prancis tidak hanya melakukan penaklukan militer, tetapi juga menerapkan kebijakan kolonial yang bersifat represif melalui perubahan sistem pemerintahan, eksploitasi ekonomi, penghapusan budaya dan bahasa Arab, serta penekanan terhadap pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat. Dampak dari imperialisme tersebut sangat luas, meliputi ketimpangan sosial dan ekonomi, perampasan tanah, kemiskinan, tingginya angka kematian akibat kekerasan dan kelaparan, serta melemahnya identitas budaya dan keislaman masyarakat Aljazair, meskipun di sisi lain kondisi ini juga memicu munculnya kesadaran nasional dan gerakan perlawanan untuk meraih kemerdekaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2002). *Ensiklopedi Dunia Islam Jilid 3*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- ALVIAN, R. A. (2016). Teori Imperialisme Baru dan Debat Marxisme-Realisme dalam Ilmu Hubungan Internasional. *Global : Jurnal Politik Internasional*, 1-17.
- Amin, S. (1970). *The Maghreb In The Modern World Algeria-Tunisia-Maroco*. Australia: Penguin Book.
- Brower, B. C. (2011). *A desert named peace: the violence of France's empire in the Algerian Sahara, 1844-1902*. Columbia: Columbia University Press.

- Brown, W. (2009). *Regulating aversion: Tolerance in the age of identity and empire*.
- Esposito, J. L. (2001). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Penerbit Mizan.
- Farge, A. (1995). *Subversive words: public opinion in eighteenth-century France*. Penn State Press.
- France, A. (1990). *The Gods Will Have Blood:(les Dieux Ont Soif)*. Penguin.
- Garraghan, G. J. (1957). *A Guide To Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Hitti, P. K. (2022). *History of Arabs*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Jarvis, J. (2021). *Decolonizing Memory: Algeria and the Politics of Testimony*. Duke University Press.
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT raja grafindo.
- Levy, M. (2010). *The History of Africa*,. New York: Britannica Educational Publishing,.
- Maryam, S. (2003). *Sejarah peradaban Islam: Dari masa klasik hingga modern*. Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga.
- Mayer, A. J. (1981). *The persistence of the ancien regime* . New York: Pantheon.
- Ozouf, M. (1991). *Festivals and the French revolution*. Harvard University Press.
- Perry, A. (2002). *Internationalism: a breviary*. New Left Review.
- Rouseet, C. (1889). *Conquete De L Algeria 1841-1887*. Paris: Librairie Plon.
- S.J, R. F. (1889). *Manuals Of Catholic Philosophy Logic*. London: Longmans, Green & CO.
- Sihbudi, R., & Djafar, Z. (1995). *Profil Negara-negara Timur Tengah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sunanto, M. (2004). *Sejarah Islam klasik dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam*. Jakarta: kencana Pradana media group.
- Tohir, A. (2009). *Studi Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: PT raja grafindo.
- Wilkin, A. (1900). *Among The Berbeda of Algeria*. London: T. Fisher Unwin.
- Yatim, B. (2008). *Sejarah Peradaban Islam* . Jakarta: PT raja grafindo persada.